

# STRATEGI AKTOR DALAM PEMANFAATAN SUMBERDAYA LAUT DI PELABUHAN RATU JAWA BARAT

*Actors Strategies on Sea Resources Utilization in Pelabuhan Ratu West Java*

Eva Royandi<sup>1</sup>, Arif Satria<sup>2,\*</sup>, Saharuddin<sup>2</sup>

<sup>1</sup>CIC Lembaga Riset dan Konsultan Sosial

<sup>2</sup>Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia IPB

\*<sup>1</sup>E-mail: [arifsatria@apps.ipb.ac.id](mailto:arifsatria@apps.ipb.ac.id)

## ABSTRACT

*This study aims to (1) analyze the authority of actors to access (control) rights-based marine resources, (2) to analyze the power of actors to access marine resources based on structures and relational resources. This Research was conducted at seawater of Pelabuhan Ratu, Sukabumi, West Java. We use qualitative methods in the present study. The results showed that among local fishers, immigrant fishers (settle), outside fishers (not settle), and managers of the thermal power station (PLTU) have different interests in using marine resources. The Fishers groups have an interest in utilizing marine and fisheries resources (including fishing areas and fish), while PLTU managers have interests in the construction of power plants, barge transportation (coal transportation), development of dams, construction of barge ship ports that buy 3 million seas. The approved PLTU activities must access fisheries against marine resources, coupled with the indication of PLTU waste pollution that harms fishers. The results of the analysis of rights-based licensing for each actor have legislation that is built on official law. The relations of the power's actors to access marine resources based on the structures and relational was held through types of power, i.e., technology, capital, markets, knowledge, authority, social identity and social relationships.*

*Keywords: access, actors, power*

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk (1) menganalisis kekuasaan aktor untuk mengakses (menguasai) sumber daya laut berbasis hak, (2) menganalisis kekuasaan aktor untuk mengakses sumber daya laut berbasis struktur dan relasional. Lokasi penelitian di Perairan Laut Pelabuhan Ratu, Sukabumi, Jawa Barat. Penelitian menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di antara nelayan lokal, nelayan pendatang (menetap), nelayan dari luar (tidak menetap), dan pengelola Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) memiliki kepentingan yang berbeda-beda dalam pemanfaatan sumber daya laut. Kelompok nelayan memiliki kepentingan untuk memanfaatkan sumber daya kelautan dan perikanan (termasuk wilayah penangkapan dan ikannya), sedangkan pengelola PLTU memiliki kepentingan untuk Pembangunan PLTU, transportasi kapal Tongkang (pengangkut Batubara), pembangunan Bendungan, Pembangunan Pelabuhan kapal Tongkang diatas 3 mil laut. Aktivitas PLTU dianggap telah membatasi akses nelayan terhadap sumber daya laut, ditambah dengan adanya indikasi pencemaran limbah PLTU yang merugikan pihak nelayan. Hasil analisis mekanisme akses berbasis hak bahwa setiap aktor memiliki kekuasaan yang dibangun secara legal dengan hukum formal. Mekanisme kekuasaan aktor untuk mengakses sumber daya laut berbasis struktur dan relasional melalui jenis kekuasaan: teknologi, modal, pasar, pengetahuan, otoritas, identitas sosial dan relasi sosial.

Kata Kunci: akses, aktor, kekuasaan

## PENDAHULUAN

Sumber daya pesisir dan laut merupakan sumber daya milik bersama (*common pool resources*) sehingga bersifat terbuka (*open acces*) dalam pemanfaatannya (Hardin 1968; Satria 2015). Ini berarti sumber daya laut dapat dimanfaatkan oleh berbagai aktor yang memiliki kepentingan ekonomi yang berbeda, sehingga dapat menimbulkan konflik (Anderson and Obeng 2017; Boucquey 2017). Konflik terjadi karena keragaman alat tangkap dan perebutan wilayah penangkapan (Crosson 2011). Oleh karena itu, negara perlu hadir untuk melakukan pengelolaan untuk menghindari konflik.

Prinsip pengelolaan sumberdaya laut di Indonesia terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 (dikenal dengan

sistem pengelolaan yang bersifat *state property*). Sumberdaya laut memiliki sifat *quasi open acces* sehingga tidak sepenuhnya dapat diakses karena dibatasi oleh sejumlah peraturan (Annisa, Satria, and A Kinseng 2009). Akan tetapi, aturan yang dibuat seringkali tidak bersifat partisipatif tanpa mempertimbangkan aspek sosial ekonomi dan budaya masyarakat lokal yang akhirnya justru menimbulkan sejumlah permasalahan baru.

Pemberian izin usaha kepada korporasi (privatisasi) dalam pemanfaatan sumberdaya laut telah merusak lingkungan dan mempengaruhi sistem sosial ekonomi masyarakat pesisir (Carothers 2015). Privatisasi tidak lepas dari multifungsi sumberdaya laut untuk berbagai kegiatan ekonomi seperti

yang terjadi di kawasan perairan Pelabuhan Ratu. Di wilayah ini dibangun Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Pelabuhan Ratu, jalur transportasi, dan usaha budidaya ikan dan perikanan tangkap. Permasalahan muncul ketika pembangunan PLTU dituding sebagai penyebab utama terjadinya degradasi lingkungan perairan laut, sehingga mempersulit nelayan untuk melakukan penangkapan ikan dan aktivitas kapal pengangkut batubara merusak alat tangkap nelayan.

Sumber daya laut yang memiliki multifungsi dapat menyebabkan kontestasi kepentingan dalam mengakses sumber daya kelautan (Arbo and Thuy 2016; Penney, Wilson, and Rodwell 2017). Perebutan akses sumberdaya laut di Pelabuhan Ratu merupakan kontestasi antara *legality access* versus *authority access*.

PLTU yang mendapatkan legalitas dari negara memiliki hak sesuai dengan hukum formal (Kurniawan 2012). Sementara itu, nelayan merasa terusik karena hak memanfaatkan sumberdaya perikanan selama ini dibatasi dengan kehadiran PLTU. Isu pencemaran lingkungan dan ditutupnya wilayah penangkapan ikan nelayan tradisional menjadi pemicu konflik para pihak dalam pemanfaatan sumberdaya laut (Syatori 2014). Para aktor yang memiliki perbedaan kepentingan berupaya memainkan strategi berdasarkan hak yang dimilikinya. Nelayan nelayan lokal,<sup>1</sup> pendatang,<sup>2</sup> dan dari luar<sup>3</sup> maupun pengelola PLTU melakukan berbagai strategi untuk tetap dapat memanfaatkan sumberdaya laut Pelabuhan Ratu dengan berbagai klaim yang mereka miliki. Priyatna, Kinseng, dan Satria (2013) menyatakan bahwa hukum formal selalu menjadi klaim satu pihak untuk menyingkirkan aktor lain dalam penguasaan sumberdaya laut. Kekuasaan untuk mengakses sumberdaya laut tidak hanya berbasis hak legal formal, tetapi juga yang dapat mempengaruhi atau menyingkirkan pihak lain.

Analisis tindakan aktor terkait dengan kepentingan, kekuasaan, dan jaringan kekuasaan yang berbeda-beda dalam mengakses sumberdaya laut dapat didekati dari kepentingan aktor (Bryant and Bailey 1997) untuk mendapatkan akses (Ribot and Peluso 2003). Kepentingan (*interest*) aktor dan kekuasaan (*power*) akan menentukan kemampuan aktor mengakses sumberdaya alam. Akses merupakan kemampuan untuk mendapatkan keuntungan dari objek material, orang lain, lembaga, dan simbol, baik berbasis hak maupun berbasis struktur dan relasional (Ribot and Peluso 2003). Akses berbasis hak berupa kekuasaan yang dibangun secara legal

dan ilegal, sedangkan akses berbasis struktur dan relasional dibangun melalui basis kekuasaan yang dimiliki oleh aktor, yang meliputi teknologi, modal, pasar, tenaga kerja, dan peluang kerja, pengetahuan, otoritas (kewenangan), identitas sosial dan relasi sosial dalam bentuk relasi patron-klien. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis strategi aktor untuk mengakses (menguasai) sumberdaya laut Pelabuhan Ratu, Sukabumi, Jawa Barat.

## METODE

Penelitian dilakukan di PPN Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat pada bulan April 2017 sampai dengan Februari 2018. Teknik Pengumpulan data melalui wawancara mendalam dengan 40 orang informan kunci yang memahami dan memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang ada di Perairan Laut Pelabuhan Ratu. Mereka adalah nelayan asli/lokal, nelayan pendatang etnis Bugis dan Jawa, nelayan dari luar Pelabuhan Ratu (nelayan Banten), dan pengelola PLTU. Wawancara juga dilakukan dengan pihak-pihak terkait (PPN Pelabuhan Ratu, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sukabumi, dan Pemerintah Kabupaten Sukabumi). Penggalan data terkait dengan sejarah pemanfaatan sumberdaya perairan dan strategi aktor dalam mengakses sumberdaya perairan menggunakan model interaktif yang terdiri atas reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan data. Ketiga proses analisis tersebut saling menjalin sebelum, selama, dan sesudah pengumpulan data (Miles and Huberman 1992).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Sejarah Pemanfaatan Sumber Daya Perairan Laut Pelabuhan Ratu

Sejak tahun 1960-an, masyarakat pesisir Pelabuhan Ratu sudah melakukan aktivitas penangkapan ikan sebagai aktivitas ekonomi. Walaupun penangkapan ikan banyak dilakukan di daerah muara sungai yang langsung berhadapan dengan perairan laut (Pelabuhan Perikanan Nusantara Pelabuhan Ratu 2017). Nelayan pendatang etnis Bugis memanfaatkan wilayah laut Pelabuhan Ratu dengan memperkenalkan alat tangkap *Pagang* (Bagan) sehingga produksi hasil tangkapan nelayan semakin meningkat. Pemerintah mulai membangun Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pelabuhan Ratu pada tahun 1985 dan telah diresmikan oleh Presiden Soeharto pada tahun 1993 untuk mendukung pengelolaan perikanan di wilayah ini. Peresmian PPN Pelabuhan Ratu telah menandakan lahirnya rezim pemerintah dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan di Pelabuhan Ratu. Tahun 1995-2005 telah mendorong berbagai perusahaan perikanan untuk ikut serta dalam aktivitas penangkapan ikan di PPN Pelabuhan Ratu.

Misalnya PT AGB Pelabuhan Ratu perusahaan yang memiliki kapasitas produksi tertinggi setiap tahunnya, dimana setiap tahun dapat memproduksi 800 ton per tahun dengan rata-rata mampu mengekspor ikan layur mencapai 650 ton per tahun. Tahun 2006 ada program pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Pelabuhan Ratu. PLTU merupakan program pemerintah untuk dapat memenuhi kebutuhan listrik di pulau Jawa-Bali.

Adanya pihak pengelola PLTU yang telah ikut serta dalam pemanfaatan sumber daya laut dianggap sudah mengganggu aktivitas masyarakat nelayan dalam penangkapan ikan. Akan tetapi, pihak PLTU memiliki hak secara legal atau formal dari

<sup>1</sup> Nelayan lokal merupakan nelayan asli Pelabuhan Ratu yang memanfaatkan sumber daya laut sebelum adanya Nelayan Pendatang dan Nelayan Dari Luar, meskipun dengan menggunakan alat pancing disekitar pesisir.

<sup>2</sup> Nelayan Pendatang merupakan nelayan yang memanfaatkan sumber daya laut Pelabuhan Ratu dan sudah menetap di wilayah Pelabuhan Ratu. Terdapat 2 (dua) nelayan Pendatang yaitu: nelayan Pendatang Etnis Bugis dari Sulawesi Selatan dan Nelayan Pendatang Etnis Jawa yang berasal dari Cirebon dan Cilacap.

<sup>3</sup> Nelayan Dari Luar merupakan nelayan yang hanya memanfaatkan wilayah laut Pelabuhan Ratu dan melakukan aktivitas pembongkaran ikan di PPN Pelabuhan Ratu. Fokus nelayan dari luar adalah Nelayan Banten (Nelayan Binuangen Banten khusus nelayan Purse Seine dan Nelayan Banten diluar Binuangen umumnya Nelayan Centrang dengan alat tangkap Jaring dan Pancing Ulur).

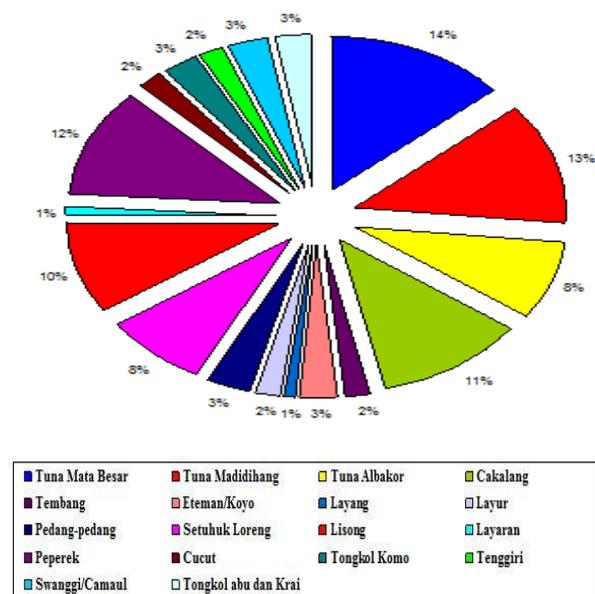
pihak pemerintah untuk dapat menggunakan wilayah pesisir dan sumber daya laut, terutama dalam pemanfaatan untuk pengangkutan bahan pembangunan PLTU dan bahan batubara yang berasal dari wilayah Kalimantan.

### Jenis dan Alur Manfaat Potensi Sumber Daya Perairan Laut Pelabuhan Ratu

Ribot dan Peluso (2003) menyatakan bahwa sebelum menganalisis lebih jauh terkait bagaimana aktor dapat menguasai, mengelola, dan mempertahankan aksesnya (kekuasaannya) untuk sumber daya laut, terlebih dahulu menganalisis atau melakukan identifikasi terkait jenis sumber daya, potensi sumberdaya dan manfaatnya (identifikasi sumberdaya, manfaat, dan alur manfaat sumberdaya). Ketiga tahap tersebut merupakan bagian yang pertama yang harus dilakukan sebelum menganalisis lebih jauh terkait aktor-aktor yang melakukan penguasaan, mengelola, dan memanfaatkan sumberdaya laut Pelabuhan Ratu. Penting untuk dipahami, bahwa Manfaat sumberdaya laut tidak hanya yang bersifat ekstraktif saja seperti perikanan tangkap, namun juga transportasi, PLTU, dan wisata bahari.

### Potensi dan Alur Manfaat Perikanan Tangkap

Wilayah pesisir Pelabuhan Ratu kaya akan potensi perikanan. Produksi perikanan tangkap pada tahun 2017 sebesar 6.797.900 Kilo Gram (Kg). Penangkapan ikan ditujukan untuk pasar domestik sampai ke luar wilayah Sukabumi dan ekspor ke Korea dan Jepang. Jenis-jenis ikan ekonomis penting yang dihasilkan dari wilayah ini antara lain tuna, tongkol, layur, dan cakalang. Dominasi hasil tangkapan ikan meliputi tuna mata besar (19%), madidihang (16%), cakalang (14%), albakor (8%), dan tongkol (5%) sebagaimana yang terdapat dalam gambar 2. Selain itu, di PPN Pelabuhan Ratu terdapat jenis ikan Udang dan lobster yang diperebutkan oleh kelompok nelayan di Pelabuhan Ratu (Dinas Kelautan dan Perikanan 2010).



Gambar 1. Komposisi Ikan Dominan di PPN Pelabuhan Ratu. Sumber: Statistik PPN Pelabuhan Ratu, 2017.

Hasil tangkap nelayan Pelabuhan Ratu dipasarkan lokal dan ekspor baik melalui TPI (PPN Pelabuhan Ratu) maupun

tidak. Ekspor ikan ke Jepang dan Korea melalui Jakarta. Nelayan umumnya lebih memanfaatkan tengkulak, *tawe*, dan bakul di luar TPI karena tingginya ikatan *Langgan-Tawe* (nelayan pemilik kapal dan anak buah kapal). Inilah salah satu hal yang mengurangi pencatatan produksi PPN Pelabuhan Ratu. Penangkapan dan distribusi anak lobster secara ilegal oleh para nelayan pancing ulur juga telah menurunkan produksi ikan layur secara riil di PPN Pelabuhan Ratu pada tahun 2016-2018. Penurunan tersebut terdapat dalam data statistik PPN Pelabuhan Ratu bahwa produksi ikan pada tahun 2015, 2016 dan 2017 sebagai berikut: 15.239.846 Kg, 7.210.829 Kg, 6.797.900 Kg. Distribusi ikan di PPN Pelabuhan Ratu terdapat dalam Gambar 2.

### Alur Manfaat Transportasi Laut

Jalur transportasi laut Pelabuhan Ratu dimanfaatkan oleh pihak PLTU dan pengelola wisata bahari. Pihak pengelola PLTU memanfaatkan transportasi laut, untuk kepentingan pengangkutan batubara dari wilayah Kalimantan ke PLTU Pelabuhan Ratu. selain itu, pihak pengelola PLTU sudah membangun pelabuhan kapal tongkang di 4 mil laut yang akan menampung kapal-kapal tongkang yang lebih besar. Kapal tongkang yang lebih besar dapat membawa batubara yang lebih banyak untuk memenuhi kebutuhan pasokan batubara bagi PPN Pelabuhan Ratu. Pengelola wisata bahari sedang melakukan pembangunan pelabuhan untuk kepentingan transportasi laut yang menghubungkan Geopark Ciletuh -Pelabuhan Ratu sekaligus untuk pengangkutan barang Pelabuhan Ratu-Jakarta.

### Alur Manfaat PLTU

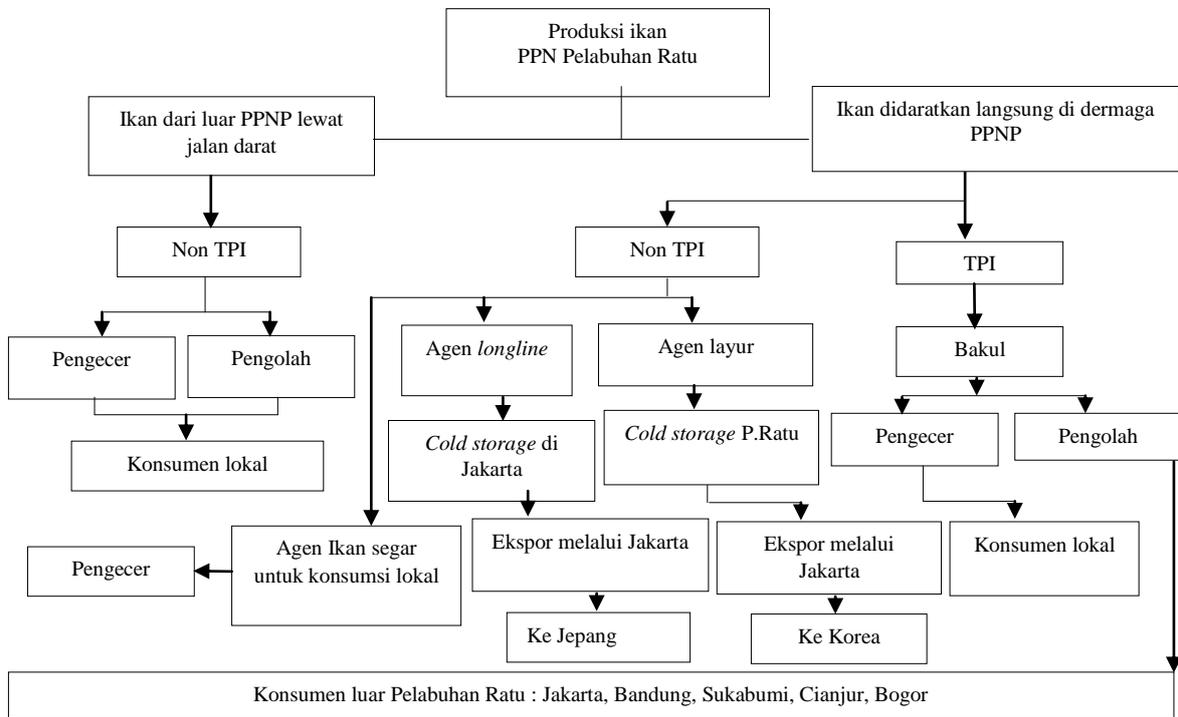
PLTU membangun bendungan (untuk tempat masuknya kapal tongkang), pelabuhan kapal tongkang (*shift to shift*) di 4 mil laut. Aliran manfaat yang disalurkan oleh pihak PLTU untuk menambah pemasokan listrik yang semakin meningkat kebutuhan konsumennya. PLTU 2 Jabar Pelabuhan Ratu Sukabumi melalui pihak PLN kemudian mendistribusikan listrik untuk memenuhi kebutuhan listrik yang dibutuhkan oleh masyarakat yang berada di pulau Jawa dan Bali.

### Alur Manfaat Wisata Bahari

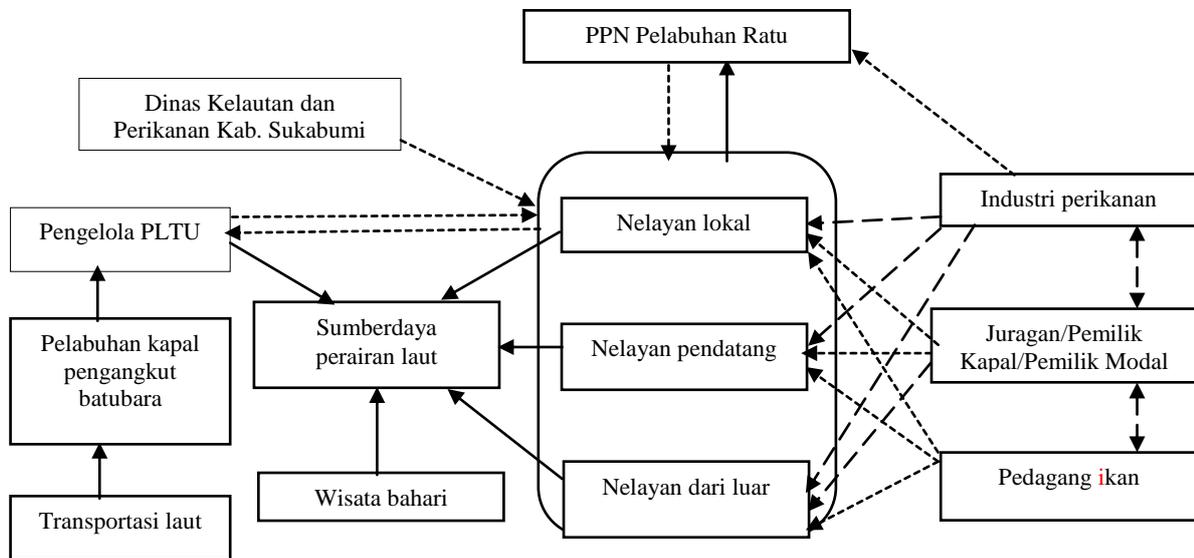
Kawasan wisata bahari meliputi: (1) Kawasan Wisata Pelabuhan Ratu dan sekitarnya, (2) Kawasan Pantai Simpenan, (3) Kawasan ekowisata Teluk Pelabuhan Ratu yang mencakup daerah pesisir di Kecamatan Cisolak, Pelabuhan Ratu, dan Cikakak, (4) Kawasan wisata sungai di Kecamatan Simpenan, dan (5) Kawasan wisata agro di Kecamatan Ciemas. Manfaatnya dapat dinikmati oleh masyarakat Sukabumi dan non-Sukabumi. Wisata Bahari dapat memberikan pemasukan kepada pihak pemerintah Kabupaten Sukabumi selain dari perikanan.

Wisata bahari sangat bermanfaat bagi pemerintah daerah karena hasilnya akan masuk ke pendapatan pemerintah daerah. bagi pihak swasta atau korporasi adanya aktivitas yang berkaitan dengan pembangunan dan perkembangan wisata bahari di wilayah laut Pelabuhan Ratu, akan memberikan keuntungan yang sangat besar. Karena, pihak swasta akan terlibat dalam proses pembangunan wisata bahari seperti pembangunan Pelabuhan untuk transportasi jalur laut dan pemeliharaan wisata bahari yang tergabung ke Geopark Ciletuh-Pelabuhan Ratu.





Gambar 2. Distribusi Ikan di PPN Pelabuhan Ratu (Statistik PPN Pelabuhan Ratu, 2016)



Gambar 3. Alur Manfaat Sumberdaya Perairan Laut Pelabuhan Ratu

Keterangan:

- Alur manfaat Sumber Daya Secara Langsung
- - - - - Alur Manfaat Sumber Daya Secara Tidak Langsung
- ← - - - - - Relasi Pemilik Modal Dalam Memperoleh Sumber Daya Laut

Pihak masyarakat setempat cukup diuntungkan dengan adanya aktivitas wisata bahari di sepanjang pantai Kabupaten Sukabumi khususnya wilayah laut Pelabuhan Ratu. Ada beberapa masyarakat yang ikut sertakan dalam proses pembangunan Pelabuhan dan ada masyarakat yang bekerja memelihara objek wisata bahari. Selain itu, ada masyarakat

yang menjadikan wisata bahari sebagai tempat untuk berusaha membuka tempat berdagang. Proses aliran manfaat dari sumberdaya laut Pelabuhan Ratu terdapat pada Gambar 3. Baik aliran manfaat secara langsung maupun mendapatkan manfaat secara tidak langsung dari sumberdaya laut Pelabuhan Ratu.

## **Kekuasaan Aktor untuk mengakses Sumberdaya Laut**

Ribot dan Peluso (2003), menyatakan bahwa akses terhadap sumber daya alam dapat ditentukan oleh *bundles of power*. Kekuasaan yang ada pada aktor bisa dimanfaatkan untuk mempengaruhi kemampuan seseorang dalam mengambil keuntungan atau akses terhadap sumberdaya baik secara legal dan ilegal ataupun terjadi paralelitas legal dan ilegal. Akses dapat berupa teknologi, modal, pasar, tenaga kerja, pengetahuan, otoritas, identitas, dan hubungan sosial. Arena kekuasaan ekonomi politik berada pada aktor yang berposisi sebagai pengontrol sumberdaya dan ada aktor yang berposisi sebagai aktor yang mempertahankan dan memanfaatkan sumberdaya alam. Priyatna et al. (2013) menyatakan bahwa kekuasaan aktor dalam mengakses sumberdaya terkait dengan strategi dalam mempertahankan, memperoleh dan mengontrol sumberdaya. Konsep kekuasaan dalam ranah ekologi politik terkait dengan kemampuan seorang aktor dalam mengendalikan interaksinya dengan lingkungan atau sumber daya dan interaksi aktor-aktor lain dengan lingkungan dalam memanfaatkan sumberdaya alam (Bryant 1998; Bryant and Bailey 1997).

Masalah akses yang terjadi di Pelabuhan Ratu terkait dengan akses kelompok nelayan yang terbatas dan mengalami perubahan wilayah penangkapan ikan karena dibangunnya PLTU untuk kepentingan pemenuhan tenaga listrik Jawa-Bali pada tahun 2006-2010. Masing-masing aktor baik kelompok-kelompok nelayan maupun pengelola PLTU memiliki strategi yang berbeda dalam mengakses sumberdaya laut Pelabuhan Ratu. Berbagai jenis kekuasaan dibangun, baik kekuasaan melalui mekanisme akses berbasis hak maupun mekanisme akses berbasis struktur dan relasional.

## **Kekuasaan dan Mekanisme Akses Aktor Berbasis Hak**

### **Nelayan Lokal**

Nelayan Pelabuhan Ratu merupakan nelayan asli dari wilayah Pelabuhan Ratu yang terus mengalami perubahan dalam mempertahankan dan memperoleh akses terhadap sumberdaya laut di wilayahnya. Kebanyakan nelayan Pelabuhan Ratu memanfaatkan alat tangkap Payang, Centang, Pagang (Bagan) dan Rumpon. Nelayan lokal umumnya beraktivitas dengan menggunakan waktu penangkapan ikan hanya sehari semalam (*one day trip*) dengan target hasil tangkapan ikan layur, tongkol, udang dan anak lobster. Mekanisme berbasis hak yang dimiliki oleh nelayan lokal selain berupa perizinan dari pihak pemerintah juga nelayan lokal merupakan nelayan asli atau pribumi di Pelabuhan Ratu, sehingga mereka lebih berhak dibandingkan dengan nelayan pendatang atau nelayan dari luar.

### **Nelayan Pendatang Etnis Bugis**

Nelayan pendatang etnis Bugis sejak awal kedatangannya pada tahun 1960-an sudah mendapatkan sambutan baik dari nelayan lokal. Dibuktikan dengan adanya alat tangkap Pagang (Bagan) sebagai simbol kesepakatan untuk melakukan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya laut Pelabuhan Ratu. Perkembangan alat tangkap Pagang yang terus mengalami peningkatan bukan saja dimanfaatkan oleh nelayan lokal dan nelayan pendatang etnis Bugis, tetapi juga ikut dimanfaatkan oleh nelayan pendatang Etnis Jawa dan nelayan dari luar Pelabuhan Ratu (nelayan Banten). Penggunaan Pagang mendorong komersialisasi ekonomi bagi nelayan lokal karena peningkatan hasil tangkapan. Produksi

yang melimpah mengundang pemerintah dan swasta mengembangkan industri perikanan.

Nelayan Etnis Bugis membangun kekuasaan secara mekanisme akses (kekuasaan) berbasis hak dengan berhasil meyakinkan pihak otoritas yaitu PPN Pelabuhan Ratu yang berada di bawah Pemerintah Pusat dan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sukabumi (Pemda). Pihak otoritas mulai memberikan izin penggunaan rumpon pada tahun 1990 bersamaan dengan dibangunnya PPN Pelabuhan Ratu. Rumpon kemudian mulai banyak digunakan pada tahun 2000.

### **Nelayan Pendatang Etnis Jawa**

Kelompok nelayan etnis Jawa dapat diidentifikasi dari jenis alat tangkap yang digunakannya, ada yang menggunakan alat tangkap Jaring, Pagang (Bagan), Rumpon, dan Payang. Tidak seperti nelayan bugis yang lebih banyak menggunakan tangkap bantu rumpon, nelayan jawa banyak menggunakan alat tangkap jaring dan bagan. Alat tangkap jaring yang digunakan umumnya nelayan pendatang etnis Jawa menangkap ikan, udang, dan lobster. Kekuasaan yang dibangun bukan saja dengan cara menjalin relasi dengan pihak PPN Pelabuhan Ratu untuk mendapatkan izin secara formal, tetapi juga diterima oleh nelayan lokal, meskipun kedua kelompok nelayan tersebut memiliki kesamaan alat tangkap dan wilayah penangkapan ikan. Hal ini berpotensi menimbulkan konflik.

### **Nelayan Dari Luar (Nelayan Banten)**

Nelayan dari luar memiliki kekuasaan yang berbasis hak melalui surat izin dari pengelola PPN Pelabuhan Ratu dan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sukabumi untuk menangkap dan membongkar ikan di wilayah Pelabuhan Ratu. Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat berbatasan langsung dengan Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, sehingga nelayan Banten banyak yang menangkap ikan di perairan Pelabuhan Ratu, bukan hanya nelayan dari Binuangen Banten, tetapi juga dari wilayah yang berdekatan dengan wilayah PPN Pelabuhan Ratu.

Selain nelayan Banten, nelayan dari luar juga berasal dari Jakarta dan Cilacap. Mereka juga memiliki izin dari pihak PPN Pelabuhan Ratu dan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Sukabumi. Surat izin tersebut dapat digunakan untuk mengakses sumberdaya laut di wilayah Pelabuhan Ratu Sukabumi. Apabila tidak memiliki izin, maka nelayan ditangkap oleh petugas atau polisi laut di wilayah Pelabuhan Ratu.

### **Pengelola PLTU**

Pengelola PLTU Pelabuhan Ratu yang secara resmi mendapatkan surat izin dari pemerintah. Pihak pengelola PLTU Pelabuhan Ratu dengan kekuasaannya memanfaatkan sumberdaya laut di wilayah Pelabuhan Ratu melalui kebijakan-kebijakan yang telah dibuat oleh pihak pemerintah. Pembangunan PLTU Pelabuhan Ratu merupakan salah satu kepentingan pembangunan nasional sesuai dengan Peraturan Presiden RI Nomor 71 tahun 2006 (Perpres RI 2006) tentang penugasan Kepada PT. PLN (Persero) untuk melakukan percepatan pembangunan pembangkit listrik yang menggunakan batubara. Perpres tersebut, menjadi dasar pembangunan 10 PLTU di Jawa termasuk PLTU Pelabuhan Ratu dan 25 PLTU di luar Jawa dan Bali.

Kekuasaan yang dibangun secara legal oleh pihak pengelola PLTU tidak bisa lepas dari adanya jalinan relasi dengan pemerintah untuk mendapatkan pengakuan yang berbentuk perjanjian atau peraturan dari pihak pemerintah. Perjanjian yang dilakukan oleh pihak PLTU dengan masyarakat nelayan di wilayah PPN Pelabuhan Ratu berupa bantuan yang wajib diberikan kepada nelayan yang terdampak secara langsung dari aktivitas pembangunan PLTU, pembangunan Pelabuhan kapal tongkang dan penggunaan transportasi laut.

Kuatnya pihak pengelola PLTU karena ada beberapa peraturan yang diberikan oleh pemerintah daerah untuk melakukan proses pembangunan dan pemanfaatan sumber daya pesisir dan wilayah laut dalam proses pembangunan atau aktivitas PLTU kedepannya. Peraturan tersebut sebagai berikut: *Pertama*, Surat Keputusan Kepala Pekerjaan Umum (PU) Kantor Pelabuhan Ratu berupa (1. Nomor

PU.607/1/2/KPL-Plr-07 tanggal 17 Juli 2007 perihal Rekomendasi Ijin Lokasi, 2. Nomor PU.626/1/01/KPL-Plr-09 Februari 2009 perihal Rekomendasi Ijin Kerja Keruk, 3. Nomor PC.032/1/1/KPL-Plr-09 tanggal 20 Februari 2009 perihal Rekomendasi Ijin Pembangunan). *Kedua*, Surat Keputusan Bupati Sukabumi nomor 593.4/1204-Tapem/2007 tanggal 28 Juni 2007 perihal Rekomendasi Ijin Pembangunan. *Ketiga*, Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 551.22/515/Sarek tanggal 25 Februari 2008 perihal Rekomendasi Ijin Pembangunan. *Keempat*, Surat Keputusan Menteri Perhubungan nomor KP. 423 Tahun 2008 tanggal 22 September 2008 perihal Ijin Lokasi dan nomor BXXXIV.256/PU 60 tanggal 5 Mei 2009 perihal Ijin Pembangunan. Surat izin tersebut sudah termasuk izin pembangunan Pelabuhan Kapal Tongkang yang berada di 4 mil laut

Tabel 1. Kekuasaan Aktor Untuk Mengakses Sumber Daya Laut Berbasis Hak (Legal dan Ilegal).

Aktor	Manfaat	Masalah	Strategi akses legal	Strategi akses ilegal	Posisi aktor
Nelayan lokal	Penggunaan alat tangkap jaring, pagang (bagan), payang, dan rumpon	Nelayan lokal lemah aksesnya terhadap sumberdaya laut karena alat tangkap pendatang yang lebih modern	Meminta bantuan alat tangkap dari Pemerintah Sukabumi Dan surat izin dari pihak PPN Pelabuhan Ratu	Menangkap benur dan didistribusikan secara ilegal	Mempertahankan akses
Nelayan pendatang etnis Bugis	Pemanfaatan wilayah penangkapan dengan alat tangkap rumpon dan bagan	Alat tangkap rumpon dianggap merugikan nelayan non-rumpon	Mendapatkan surat izin dari pihak PPN Pelabuhan Ratu, Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Sukabumi	Tidak mematuhi aturan penggunaan alat tangkap dan tidak memiliki surat ijin	Mengontrol akses
Nelayan pendatang etnis Jawa	Pemanfaatan wilayah penangkapan udang, lobster dan Layur	Nelayan etnis Jawa dianggap merebut wilayah penangkapan nelayan lokal	Meminta jaminan keamanan usaha dalam menangkap ikan, udang, dan lobster dari pihak PPN Pelabuhan Ratu	Menggunakan alat tangkap yang dilarang dan tidak memiliki atau telah ijin penangkapan ikan	Mempertahankan akses
Nelayan dari luar (nelayan Banten)	Pemanfaatan wilayah penangkapan dengan alat tangkap jaring dan purse seine	Alat tangkap purse seine dianggap mengambil wilayah penangkapan nelayan lokal	Meminta ijin kepada PPN Pelabuhan Ratu untuk melakukan penangkapan dan pembongkaran ikan	Melakukan kerjasama penangkapan benur dengan nelayan Lokal	Mempertahankan akses
Pengelola PLTU	Pembangunan PLTU, bendungan, pelabuhan tongkang	Dituding menghasilkan limbah yang mencemari lingkungan dan operasional tongkang merusak alat tangkap nelayan	Menjalin relasi dengan pemerintah untuk mendapatkan pengakuan	Menggunakan alur transportasi laut tidak sesuai navigasi (tanda)	Mengontrol akses

### Kekuasaan dan Mekanisme Akses Berbasis Struktur dan Relasional

Mekanisme akses atau kekuasaan aktor untuk mengakses sumberdaya laut berdasarkan struktur dan relasional sangat dinamis tergantung pada kondisi sosial budaya masyarakat setempat Ribot dan Peluso (2003) menjelaskan bahwa teknologi, kapital, pasar, tenaga kerja, pengetahuan, otoritas, identitas sosial, dan relasi sosial, merupakan basis kekuasaan (*power*) yang mempengaruhi aktor memanfaatkan sumberdaya. Setiap aktor dapat memiliki dan menguasai berbagai jenis *power* sekaligus atau hanya bergantung pada satu jenis kekuasaan saja. Kekuasaan berbasis struktur dan relasional yang dibangun oleh aktor dalam pemanfaatan sumberdaya laut Pelabuhan Ratu berupa kekuasaan yang dibangun oleh teknologi (alat tangkap), modal, pasar, pengetahuan, identitas sosial, tenaga kerja, dan otoritas dan relasional berupa pertemanan, rasa saling percaya, hubungan timbal balik, tanggungjawab dan patronase (Febryano et al. 2015). Aktor yang memiliki jenis kekuasaan dan basis

kekuasaan yang banyak yang dapat memenangkan akses terhadap sumber daya alam (sumber daya laut)

#### Nelayan Lokal

Identitas dan relasi sosial masih kuat dibangun oleh nelayan lokal yang merasa lebih berhak atas sumberdaya laut di Pelabuhan Ratu. Kekuasaan identitas dibangun untuk memperoleh dan mempertahankan akses terhadap sumberdaya laut. Hubungan patron-klien dengan pemilik modal atau pemilik kapal dilakukan oleh nelayan lokal di Pelabuhan Ratu untuk dapat mengakses sumberdaya laut. Nelayan Lokal menjadi anak buah Tawe (pemilik kapal) nelayan Bugis, pemodal besar pemilik rumpon. Nelayan lokal menggunakan modal sendiri atau meminjam dari tengkulak lokal ketika mengoperasikan alat tangkap selain rumpon.

#### Nelayan Pendatang Etnis Bugis

Nelayan Bugis memainkan kekuasaan yang dibangun secara identitas sosial sesama agama Islam dan melakukan pernikahan dengan masyarakat. Kemudian, aktor nelayan

Tabel 2. Kekuasaan Aktor Untuk Mengakses Sumber Daya Laut Berbasis Struktur dan Relasional.

Struktur dan relasional (Aktor)	Strategi Memperoleh Akses	Strategi Mempertahankan Akses	Bundle of power
Nelayan Lokal	Nelayan asli sebagai pemilik wilayah pesisir dan laut yang sah	Lebih banyak menggunakan alat tangkap payang dan bergabung dengan nelayan pendatang dan nelayan dari luar membentuk hubungan patron-klien	Identitas Sosial (berupa etnis sunda dan agama), <i>Trust</i> , menjalin relasi dengan pihak otoritas
Nelayan Pendatang Etnis Bugis	Melalui pengetahuan atau teknik pembuatan alat tangkap	Membuat surat izin kepada pihak otoritas untuk mengawali alat tangkap baru di Pelabuhan Ratu seperti alat bantu penangkapan rumpon tahun 1990-an dan membangun relasi sosial untuk memulai alat tangkap pagang (bagan) tahun 2000-an	Teknologi, Modal, Pasar, Otoritas, Identitas, pengetahuan dan relasional ( <i>Trust</i> ) dan patronase (Patron-Klien)
Nelayan Pendatang Etnis Jawa	Melalui pembuatan kapal dan menjalin hubungan dengan nelayan lokal dan pendatang etnis Bugis	Memfokuskan alat tangkap untuk menangkap ikan udang dan lobster dan menentukan wilayah penangkapan ikan	Teknologi, Modal, Identitas, patron-klien dan <i>Trust</i>
Nelayan Dari Luar (Nelayan Banten)	Nelayan yang pernah satu wilayah Provinsi dan kedekatan dengan nelayan lokal	Menjalin hubungan <i>trust</i> dengan nelayan lokal dan patronase	Identitas sosial sebagai etnis Sunda
Pengelola PLTU	Melalui pihak otoritas	Menggunakan modal untuk menjalin relasi dengan pihak pemerintah. Memberi bantuan dana dan alat tangkap kepada nelayan. Mendekati ibu-ibu nelayan dengan memberikan modal untuk membuat abon ikan dan membuat tempat-tempat sampah di perumahan nelayan	Modal, <i>Trust</i> dan otoritas

pendatang etnis Bugis mulai menggunakan kekuasaan pengetahuan tentang teknik penangkapan ikan sampai dengan pembuatan teknologi penangkapan ikan yaitu pagang (nama lokal di Pelabuhan Ratu) atau bagan. Nelayan Bugis menggunakan kekuasaan teknologi, identitas, modal, dan otoritas untuk mengoperasikan rumpon sebagai alat bantu penangkapan ikan. Nelayan Bugis mengajak semua kelompok nelayan lainnya untuk bergabung memanfaatkan rumpon untuk menghindari konflik.

#### Nelayan Pendatang Etnis Jawa

Akses sumberdaya melalui teknologi dimanfaatkan oleh nelayan etnis Jawa dengan mengambil posisi pada penggunaan alat tangkap jaring dan dogol khusus menangkap ikan, udang dan lobster Nelayan etnis Jawa berasal dari Cirebon dan Cilacap. Relasi dengan nelayan lokal dibangun melalui kerjasama (negosiasi) dalam pemanfaatan wilayah penangkapan. Selain itu, juga dalam pembuatan dan perbaikan kapal. Relasi juga dikembangkan nelayan pendatang etnis Jawa dengan tokoh atau tengkulak lokal untuk menjamin rasa aman dalam usaha perikanan mereka. Selain itu, nelayan pendatang etnis Jawa menjalin relasi dengan Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) dan otoritas yaitu PPN Pelabuhan Ratu dan Dinas Kelautan dan Perikanan dalam melakukan pengelolaan, pemanfaatan, dan penguasaan wilayah sumberdaya perikanan tangkap.

#### Nelayan dari Luar (Nelayan Banten)

Strategi kekuasaan untuk mengakses sumber daya laut berbasis struktur dan relasional yang dilakukan oleh nelayan Banten dengan menjalin relasi dengan pihak otoritas yaitu PPN Pelabuhan Ratu dan Dinas Kelautan dan Perikanan

Kabupaten Sukabumi. Selain itu, relasi juga dibangun dengan nelayan lokal yang sama-sama beretnis Sunda.

Alat tangkap yang digunakan oleh nelayan Banten berupa alat tangkap purse seine, cantrang, jaring, bagan, dan alat tangkap bantu rumpon. Nelayan Banten juga ada yang bersama-sama mengoperasikan alat tangkap bagan dengan nelayan lokal.

#### Pengelola PLTU

Relasi yang dibangun pihak PLTU dengan pihak otoritas yaitu PPN Pelabuhan Ratu, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sukabumi, dan Pemerintah Kabupaten Sukabumi telah dibangun sejak awal pembangunan PLTU. Pengelola PLTU juga melakukan pemberdayaan kepada wanita nelayan untuk membuat dan memasarkan abon ikan ke beberapa wilayah di Kabupaten Sukabumi dan memberikan bantuan alat tangkap maupun modal kepada nelayan. Kekuasaan yang dibangun oleh pihak Pengelola PLTU bukan saja melalui kekuasaan otoritas, tetapi juga kekuasaan yang dibangun dengan memanfaatkan kekuatan modal dan saling percaya (*trust*).

#### Kekuasaan dan Jaringan Kekuasaan untuk Mempengaruhi Aktor Lain dalam Mengakses Sumber Daya Laut Pelabuhan Ratu

Ribot dan Peluso (2003) mendefinisikan akses sebagai kumpulan kekuasaan (*bundle of power*) dan kumpulan jaringan kekuasaan (*web of power*) yang didalamnya terdapat mekanisme, proses dan relasional, sehingga dapat membuat aktor-aktor yang memiliki kekuasaan mampu untuk mengontrol, memanfaatkan dan memelihara akses terhadap

sumber daya alam (termasuk sumber daya laut). Ribot dan Peluso (2003) memfokuskan telaaahnya dalam menjelaskan inti dari akses yaitu terkait dengan relasi kekuasaan antar berbagai aktor dalam memperoleh, mempertahankan dan mengontrol sumber daya, termasuk objek material, orang, kelembagaan, dan simbol. Kekuasaan melekat dan dapat dilaksanakan melalui berbagai mekanisme, proses dan relasi sosial. Baik kekuasaan yang dibangun melalui mekanisme berbasis hak (legal dan ilegal), maupun kekuasaan yang melalui mekanisme berbasis struktur dan relasional yang memberikan penjelasan bahwa penguasaan teknologi, pasar, modal, tenaga kerja dan peluang tenaga kerja, pengetahuan, otoritas, identitas sosial dan relasi sosial dapat mempengaruhi akses berbagai aktor terhadap sumber daya. Relasi kekuasaan antar berbagai aktor dijelaskan dengan menelaah bagaimana aktor menggunakan kekuasaan yang dimilikinya untuk dapat mengendalikan atau mengontrol aktor lain dalam memperoleh sumber daya. Semakin banyak jumlah kekuasaan yang dimilikinya semakin besar juga akses aktor terhadap sumber daya laut di Pelabuhan Ratu.

### **Nelayan Pendetang Etnis Bugis**

Nelayan Pendetang Etnis Bugis menggunakan kekuasaan teknologi untuk dapat menguasai wilayah laut Pelabuhan Ratu, terutama wilayah tempat ikan dominan yang berada di wilayah laut Pelabuhan Ratu. Teknologi dapat memperkuat fasilitas yang dimiliki oleh Nelayan Pendetang Etnis Bugis, misalnya dengan pembuatan alat tangkap Bagan yang diperkenalkan kepada nelayan lokal dan nelayan Pendetang Etnis Jawa juga Nelayan Dari Luar (Nelayan Banten). Akses modal dan pasar yang dimiliki oleh Nelayan Pendetang Etnis Bugis mampu mempengaruhi kewenangan atau otoritas pihak PPN Pelabuhan Ratu, DKP Kabupaten Sukabumi dan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi untuk memberikan perizinan penempatan alat tangkap bantu rumpon di wilayah PPN Pelabuhan Ratu. Selain mampu mempengaruhi pihak otoritas Nelayan pendatang Etnis Bugis juga mampu mengajak kelompok-kelompok nelayan lain termasuk nelayan lokal untuk mendukung diadakannya alat tangkap bantu rumpon. Akhirnya, pada tahun 2000-2005 alat tangkap rumpon diterapkan di Pelabuhan Ratu, walaupun masih banyak pertentangan dari nelayan yang tidak setuju dengan adanya alat tangkap bantu rumpon. Kekuasaan yang dibangun melalui akses tenaga kerja dilakukan dengan cara mempekerjakan Nelayan Lokal, Nelayan Pendetang Etnis Jawa dan Nelayan dari Luar (Nelayan Banten) dalam proses penangkapan ikan yang menggunakan alat tangkap bantu rumpon.

Akses pengetahuan yang digunakan oleh Nelayan pendatang Etnis Bugis melalui wacana tentang manfaat dan keunggulan dari alat tangkap bantu rumpon yang bisa meningkatkan produksi hasil tangkapan ikan bagi nelayan di Pelabuhan Ratu. bahkan, dalam wacananya alat tangkap rumpon merupakan solusi dari ketidakpastian penangkapan ikan di wilayah laut PPN Pelabuhan Ratu. dengan demikian, nelayan Pendetang Etnis Bugis mendapatkan dukungan dari pihak otoritas dan sebagian nelayan di Pelabuhan Ratu untuk dapat memperluas wilayah alat tangkap bantu rumpon di Pelabuhan Ratu. bahkan, jarak penempatan alat tangkap rumpon dapat dirubah oleh nelayan pendatang etnis bugis.

Kekuasaan yang dibangun melalui identitas sosial bukan saja melalui identitas sosial sebagai etnis bugis tetapi juga menggunakan pendekatan agama. Nelayan Pendetang Etnis

Bugis memulai perjalanannya untuk menguasai sumber daya laut Pelabuhan Ratu dengan isu Agama. Dengan isu agama Etnis Bugis menekankan bahwa mereka sama-sama beragama Islam, sehingga dapat langsung menjalin hubungan secara identitas sosial. Selain itu, mereka menekankan bahwa antara nelayan pendatang Etnis Bugis dengan Nelayan Lokal sama-sama mendefinisikan kehidupannya sebagai nelayan.

Kekuasaan yang dibangun melalui relasi sosial dengan menekankan pada hubungan patron-klien antara nelayan Etnis Bugis dengan nelayan lokal, nelayan pendatang Etnis Jawa dan Nelayan dari Luar (Nelayan Banten), terutama dalam aktivitas penangkapan ikan dengan alat tangkap bantu rumpon. Selain itu, nelayan pendatang Etnis Bugis menjalin relasi sosial melalui hubungan pernikahan dengan nelayan lokal, sehingga tidak asing lagi, bahwa banyak keturunan campuran antara nelayan Etnis Bugis dengan nelayan lokal yang menjadi nelayan di Pelabuhan Ratu. selain itu, Nelayan pendatang Etnis Bugis membangun rasa saling percaya (trust), hubungan Patron-Klien, dan hubungan pesahabatan dengan nelayan lokal atau masyarakat disekitar wilayah Pelabuhan Ratu. dengan cara membagi-bagikan ikan ketika hasil tangkapan ikan melimpah, walaupun tidak melimpah biasanya ada beberapa masyarakat yang berpengaruh dan dekat dengan Nelayan pendatang etnis Bugis mendapatkan ikan hasil tangkapan secara gratis.

### **Nelayan Lokal**

Nelayan Lokal membangun kekuasaan melalui Identitas sosial dan relasi sosial untuk dapat mempengaruhi aktor lain dalam mengakses sumberdaya laut Pelabuhan Ratu. Posisi Nelayan Lokal sebagai nelayan asli atau pribumi menjadi alasan atau kekuatan mereka untuk memperoleh akses terhadap sumberdaya laut, baik secara langsung maupun melalui negosiasi dengan nelayan Pendetang dan Nelayan Dari Luar. Nelayan lokal merasa lebih berhak atas sumberdaya laut di Pelabuhan Ratu. Karena, mereka merupakan pemilik dan pewaris yang sah dari nenek moyang mereka sebelum Indonesia merdeka, dibandingkan dengan nelayan Pendetang dan Nelayan Dari Luar. Untuk mempertahankan kekuasaan untuk mengakses sumberdaya laut Pelabuhan Ratu, Nelayan Lokal membangun kekuasaan dan jaringan kekuasaan dengan Nelayan Pendetang dan Nelayan Dari Luar. Salah satu negosiasinya dengan melakukan kerjasama pada alat tangkap bantu rumpon dan alat tangkap bagan yang dibawa dan diperkenalkan oleh etnis Bugis.

Jaringan kekuasaan melalui negosiasi dengan pihak otoritas dilakukan oleh Nelayan Lokal, untuk mempertahankan aksesnya terhadap sumberdaya laut di Pelabuhan Ratu. memiliki kedekatan dan kesamaan identitas sosial antara nelayan lokal dan pihak otoritas menjadi modal untuk dapat bertahan dan ikut serta dalam pemanfaatan sumberdaya laut di Pelabuhan Ratu dengan berbagai alat tangkap termasuk bergabung untuk memanfaatkan alat tangkap rumpon yang dikuasai oleh nelayan Pendetang etnis Bugis.

### **Nelayan Pendetang Etnis Jawa**

Nelayan Pendetang Etnis Jawa membangun kekuasaan melalui identitas sosial dan relasi sosial untuk dapat memberikan pengaruh terhadap aktor lain dalam menguasai sumberdaya laut Pelabuhan Ratu. dengan kekuasaan identitas sosial sebagai pemeluk agama Islam dan sebagai sesama nelayan Nelayan Pendetang Etnis Jawa mampu meyakinkan

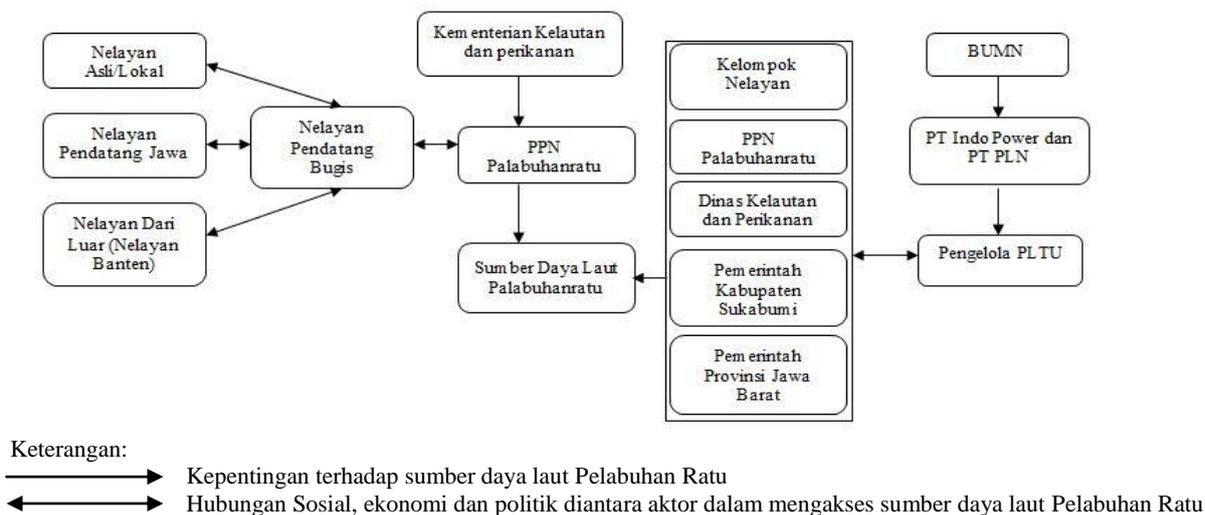
nelayan lokal dan Nelayan pendatang Etnis Bugis untuk dapat bekerjasama dalam pemanfaatan sumberdaya laut Pelabuhan Ratu. melalui relasional yang berupa saling percaya (*trust*), membangun sistem persahabatan melalui kerjasama penangkapan ikan dengan alat tangkap yang sama dan wilayah penangkapan yang sama. Umumnya persahabatan juga dicirikan dengan membagi-bagi hasil tangkapan untuk nelayan lokal atau masyarakat disekitar Pelabuhan Ratu, ketika hasil tangkapan ikan yang banyak.

Kekuasaan yang dibangun melalui relasi patron-klien antara nelayan Pendatang etnis Jawa dengan Nelayan Lokal terjadi dalam alat tangkap Pagang (Bagan) dan alat tangkap Jaring yang khusus digunakan untuk menangkap Udang dan Lobster. Walaupun, saat ini, hubungan patron-klien antara nelayan Jaring lebih banyak terkait dengan penangkapan ikan ilegal yaitu anak lobster atau Benur. Kekuasaan melalui relasi

patron-klien digunakan oleh Nelayan pendatang Etnis Jawa dalam mempertahankan aksesnya terhadap sumberdaya laut Pelabuhan Ratu. salah satunya, dengan melakukan negosiasi dengan nelayan pendatang Etnis Bugis bahkan mereka menerima menjadi Klien dari Nelayan Pendatang etnis Bugis untuk bergabung dan ikut memanfaatkan alat tangkap bantu rumpun di PPN Pelabuhan Ratu.

### Nelayan Dari Luar (Nelayan Banten)

Nelayan dari Luar (Nelayan Banten) membangun kekuasaan melalui identitas sosial dan relasi sosial untuk dapat mempengaruhi aktor lain dalam menguasai sumberdaya laut Pelabuhan Ratu. Nelayan Banten memiliki identitas etnis Sunda yang sama dengan masyarakat nelayan Pelabuhan Ratu sebagai nelayan lokal atau pribumi. Selain itu, hubungan administrasi karena sebelum tahun 2000 wilayah Banten masih merupakan bagian dari provinsi Jawa Barat.



Gambar 4. Relasi Sosial, Ekonomi dan Politik Untuk Mengakses sumberdaya laut Pelabuhan Ratu

Hubungan relasional dibangun melalui hubungan kedekatan, kepercayaan, persahabatan dan hubungan Patron-Klien. Hubungan antara nelayan lokal dengan nelayan Dari Luar lebih kepada aktivitas penangkapan ikan ilegal yaitu anak lobster atau benur. Kekuasaan identitas sosial dan relasional yang dimiliki oleh nelayan dari Luar digunakan untuk dapat mempertahankan aksesnya terhadap sumberdaya laut. Hubungan kekuasaan dan jaringan kekuasaan yang digunakan oleh masing-masing aktor untuk mempengaruhi aktor lain dalam mengakses sumberdaya laut Pelabuhan Ratu terdapat dalam gambar 4. Terlihat jelas bahwa nelayan Pendatang Etnis Bugis merupakan aktor yang mampu mengontrol dan mempertahankan aksesnya terhadap sumberdaya, sehingga mereka mampu mempengaruhi aktor lain untuk mendapatkan sumberdaya laut Pelabuhan Ratu Sukabumi.

### Pengelola PLTU

Kekuasaan melalui menjalin relasi dengan pihak otoritas dimainkan oleh pengelola PLTU dengan meminta peizinan dengan pihak pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Selain itu, kekuasaan yang dibangun dengan relasi sosial melalui perjanjian dan kepercayaan. Pihak PLTU melaksanakan perjanjiannya dengan memberikan bantuan

berupa dana dan alat tangkap bagi nelayan yang terkena dampak dari pembangunan dan aktivitas PLTU Pelabuhan Ratu. pemberdayaan ibu-ibu nelayan dengan memberikan modal pembuatan abon ikan dan asin, membangun tempat sampah dan memberikan sumbangan dana untuk tempat beribadah (masjid) di kampung Nelayan.

### KESIMPULAN

Akses dalam pemanfaatan sumberdaya laut di Pelabuhan Ratu dibangun para aktor melalui mekanisme hak dan mekanisme struktur dan relasional sebagai berikut: Kelompok nelayan berusaha mempertahankan penguasaan sumberdaya laut dengan memanfaatkan mekanisme hak yaitu identitas sosial yang dipadukan dengan relasi sosial. Sementara itu, PLTU menggunakan kekuasaan modal dan otoritas untuk mengakses hak penguasaannya. Mekanisme struktur dan relasional yang dikembangkan kelompok nelayan adalah *trust* untuk menghindari konflik penangkapan ikan, sedangkan PLTU memanfaatkan kekuasaan modal dan otoritas dalam membangun dan mempertahankan akses terhadap sumberdaya laut Pelabuhan Ratu.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, Alistair R. and Bernard A. Obeng. 2017. "Enterprise as Socially Situated in a Rural Poor Fishing Community." *Journal of Rural Studies* 49:23–31.
- Annisa, Luluk, Arif Satria, and Rilus A Kinseng. 2009. "Konflik Nelayan Di Jawa Timur: Studi Kasus Perubahan Struktur Agraria Dan Diferensiasi Kesejahteraan Komunitas Pekebun Di Lebak, Banten." *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan* 3(1):113–24.
- Arbo, Peter and Pham Thi Thanh Thuy. 2016. "Use Conflicts in Marine Ecosystem-Based Management - The Case of Oil versus Fisheries." *Ocean and Coastal Management* 122:77–86.
- Boucquey, Noëlle. 2017. "'That's My Livelihood, It's Your Fun': The Conflicting Moral Economies of Commercial and Recreational Fishing." *Journal of Rural Studies* 54:138–50.
- Bryant, Raymond L. 1998. "Power, Knowledge and Political Ecology in the Third World: A Review.: Discovery Service for Jawaharlal Nehru Univ." *Progress in Physical Geography* 1:79–94.
- Bryant, Raymond L. and Sinéad Bailey. 1997. *Third World Political Ecology*. New York: Routledge.
- Carothers, Courtney. 2015. "Fisheries Privatization, Social Transitions, and Well-Being in Kodiak, Alaska." *Marine Policy* 61:313–22.
- Crosson, Scott. 2011. "Resistance To Alternative Management In Fisheries: Economic And Cultural Considerations Of North Carolina's Commercial Fishers." *Politics Life Science* 30(2):31–42.
- Dinas Kelautan dan Perikanan. 2010. *Laporan Kegiatan Perikanan Tangkap. Dinas Kelautan Dan Perikanan Pelabuhan Ratu*. Sukabumi.
- Febryano, Indra Gumay, Didik Suharjito, Duding Darusman, Cecep Kusmana, and Aceng Hidayat. 2015. "Aktor Dan Relasi Kekuasaan Dalam Pengelolaan Mangrove Di Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung, Indonesia." *Analisis Kebijakan Kehutanan* 12:123–38.
- Hardin, Garrett. 1968. "The Tragedy Of The Commons." *Science* 162(3859):1243–48.
- Kurniawan, David. 2012. "Analisa Dampak Pembangunan Pembangkit Listrik 10.000 MW Terhadap Perekonomian Indonesia." Universitas Indonesia.
- Miles, Matthew B. and A. Michael Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI Press.
- Pelabuhan Perikanan Nusantara Pelabuhan ratu. 2017. *Statistik Pelabuhan Perikanan Nusantara Pelabuhan Ratu*. Sukabumi.
- Penney, Ryan, Geoff Wilson, and Lynda Rodwell. 2017. "Managing Sino-Ghanaian Fishery Relations: A Political Ecology Approach." *Marine Policy* 79:46–53.
- Priyatna, Fatriyandi Nur, Rilus A. Kinseng, and Arif Satria. 2013. "Akses Dan Strategi Aktor-Aktor Dalam Pemanfaatan Sumber Daya Waduk Djuanda." *Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan Dan Perikanan* 8(1):1–9.
- Ribot, Jesse C. and Nancy Lee Peluso. 2003. "A Theory of Access." *Rural Sociology* 68(2):153–81.
- Satria, Arif. 2015. *Politik Kelautan Dan Perikanan: Catatan Perjalanan Kebijakan Era SBY Hingga Jokowi*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obar Indonesia.
- Syatori, Ahmad. 2014. "Ekologi Politik Masyarakat Pesisir: Analisis Sosiologis Kehidupan Sosial-Ekonomi Dan Keagamaan Masyarakat Nelayan Citemu Cirebon." *Jurnal Holistik* 15(2):241–64.